

## Pembekalan Materi Akuntansi Keuangan Desa Pada Guru-Guru Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Palembang

Agil Novriansa<sup>1</sup>, Tertiarto Wahyudi<sup>2</sup>, Aryanto<sup>3</sup>

### **Keywords :**

Akuntansi Keuangan Desa;  
SMK;  
Guru Akuntansi;  
Pelatihan.

### **Correspondensi Author**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Sriwijaya  
Email: [agilnovriansa@unsri.ac.id](mailto:agilnovriansa@unsri.ac.id)

### **History Article**

*Received:* 20-04-2021;  
*Reviewed:* 26-05-2021;  
*Accepted:* 20-06-2021;  
*Available Online:* 27-06-2021;  
*Published:* 17-08-2021;

**Abstrak.** Adanya mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan pada perubahan struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2018 menjadi suatu tantangan bagi guru-guru akuntansi SMK di kota Palembang. Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran tersebut adalah penyusunan laporan keuangan desa yang merupakan bagian dari materi akuntansi keuangan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di kota Palembang. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk webinar secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pelatihan dalam bentuk edukasi dengan menggunakan metode ceramah, tutorial dan diskusi. Bentuk evaluasi yang dilakukan berupa para peserta diberikan post-test untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi akuntansi keuangan desa. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sebanyak 34 guru akuntansi SMK di Kota Palembang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 14 November 2020 mulai dari jam 09.30 s.d selesai. Ada 6 topik bahasan dalam kegiatan pembekalan materi akuntansi keuangan desa ini yaitu aspek hukum keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, konsep dasar akuntansi, tahapan siklus akuntansi, penulisan bukti-bukti akuntansi dan penyusunan laporan keuangan desa. Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini cukup baik dan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang ini cukup efektif dalam memberikan pemahaman lanjutan mengenai materi akuntansi keuangan desa.

**Abstract.** The existence of an accounting practicum subject for government institutions/agencies in changing the curriculum structure of the Vocational High School in 2018 is a challenge for vocational accounting teachers in Palembang. One of the main topics in this subject is the preparation of village

financial reports as a part of village financial accounting material. This community service activity aims to provide material for village financial accounting to vocational school accounting teachers in Palembang. This activity is carried out in the form of an online webinar via Zoom Meeting. This community service is a training in the form of education using lectures, tutorials and discussions. The form of evaluation that was carried out was that the participants were given a post-test to measure their understanding of village financial accounting material. The number of participants who participated in this community service activity was 34 vocational school accounting teachers in Palembang. This community service activity was carried out on November 14, 2020 starting from 09.30 until finished. There are 6 topics discussed in the provision of village financial accounting material, namely aspects of village finance law, village financial management, basic accounting concepts, accounting cycle stages, writing accounting evidence and preparing village financial reports. The results of the evaluation of community service activities are quite good and it can be concluded that the provision of village financial accounting material for vocational accounting teachers in Palembang is quite effective in providing advanced understanding of village financial accounting material.



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
4.0 International License*



## PENDAHULUAN

Penerbitan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang diiringi dengan beberapa peraturan pendukung yang terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014, PP No. 60 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 dan Permendagri No. 114 tahun 2014 membuat kepala desa memiliki wewenang penuh dalam mengelola pemerintahan desanya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, PP No. 60 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan memperoleh sumber pendanaan berupa dana desa yang berasal dari APBN dan alokasi dana desa untuk membiayai kegiatan yang bersifat pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan desa. Desa akan menerima kurang lebih satu milyar per tahun tergantung dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan

desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi desa tersebut (Astuti, Murwani, & Sugiharto, 2020).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa sebaiknya dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Atmadja & Saputra, 2017). Pengelolaan keuangan desa diupayakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Srirejeki, 2015). Aparatur desa perlu menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) agar alokasi dana desa dan sumber pendapatan desa lainnya tepat sasaran, selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir dibuat laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBDesa (Novriansa, Muthia, Mardalena, & Setiawan,

2019). Kondisi ini menuntut para aparatur desa untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, namun pada praktiknya masih cukup banyak aparatur desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang cukup untuk membuat anggaran dan laporan keuangan (Novriansa et al., 2019).

Pada pelaksanaannya terdapat tiga kelemahan pengelolaan dana desa sesuai dengan temuan BPKP yaitu egosentrisme kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ketidakpahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa, dan lemahnya pengawasan publik (Gayatri & Latrini, 2018). Hasil penelitian (Meutia & Liliana, 2017) dengan menggunakan sampel 26 desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan juga menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa masih menjadi masalah beberapa desa, belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih lemahnya kompetensi sumber daya manusia di desa yang dapat mengelola keuangan desa dengan baik. Sebagian besar responden penelitian (Meutia & Liliana, 2017) merupakan aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian kurikulum sekolah menengah yang merupakan presentasi sumber daya manusia yang umumnya berada pada jajaran pemerintahan desa (Astuti et al., 2020). Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu (Anggraini, Hasanah, Fauzi, & Utamingtyas, 2018).

Adanya perubahan struktur kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari kurikulum tahun 2013 menjadi kurikulum tahun 2018 menjadi suatu tantangan bagi para guru. Pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Berdasarkan struktur kurikulum terbaru tersebut, untuk jurusan akuntansi dan lembaga keuangan mengalami perubahan pada bagian kompetensi keahlian yaitu munculnya mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan. Mata pelajaran praktikum tersebut berisikan 2 materi pokok yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang diajarkan pada kelas XI dan penyusunan laporan keuangan desa yang diajarkan pada kelas XII (Sari, Pebriyani, & Afriyenti, 2019). Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang belum pernah masuk ke dalam kurikulum SMK (Sari et al., 2019). Hal ini mengakibatkan munculnya indikasi kesulitan untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut, khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan desa. Oleh karena itu, guru-guru Akuntansi SMK perlu untuk mendapatkan pembekalan materi atau pelatihan mengenai akuntansi keuangan desa agar bisa memberikan pemahaman yang baik kepada para siswa.

## METODE

Khalayak sasaran yang dipilih sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru-guru akuntansi sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di Kota Palembang. Target khalayak sasaran kegiatan sebanyak 30 orang guru-guru akuntansi SMK Negeri dan Swasta. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk webinar secara *online* dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Bahan yang digunakan adalah materi yang disajikan dalam bentuk *powerpoint*. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah laptop atau handphone yang dilengkapi dengan kuota internet yang cukup untuk mengakses acara di *Zoom Meeting*.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pelatihan dalam bentuk edukasi kepada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang mengenai akuntansi keuangan desa. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial dan diskusi. Bentuk evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa para peserta akan diberikan *post-test* untuk mengukur

pemahaman mereka tentang materi akuntansi keuangan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persiapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Persiapan kegiatan pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang dilakukan dengan cara tim pengabdian mengumpulkan seluruh kontak atau nomor telepon sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di Kota Palembang. Tim pengabdian masyarakat juga membuat formulir pendaftaran dengan menggunakan aplikasi *google form*. Tim pengabdian masyarakat juga mendesain *flyer* atau selebaran yang berkaitan dengan acara pengabdian. Selebaran ini berfungsi sebagai media informasi yang lengkap dan efektif mengenai acara pengabdian masyarakat ini.

Tim pengabdian masyarakat selanjutnya menghubungi nomor telepon SMK untuk menginformasikan kegiatan pengabdian masyarakat ini sekaligus meminta nomor *whats-app* salah satu guru akuntansi untuk *follow up* lebih lanjut. Tim pengabdian masyarakat selanjutnya menghubungi nomor *whats-app* guru-guru akuntansi SMK di kota Palembang dan memberikan selebaran kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tim pengabdian masyarakat juga memberikan *link* pendaftaran kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selain itu, tim pengabdian masyarakat menghubungi koordinator musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Akuntansi kota Palembang untuk meminta bantuan terkait penyebaran informasi kegiatan pengabdian masyarakat ini agar semakin banyak peserta yang mendaftar.

Jumlah guru akuntansi SMK yang mendaftar dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sebanyak 39 orang yang berasal dari berbagai SMK Negeri dan Swasta di kota Palembang. Jumlah calon peserta yang berasal dari SMK Negeri sebanyak 21 orang, sementara sisanya sebanyak 18 orang berasal dari SMK Swasta. Calon peserta yang telah mendaftar selanjutnya diarahkan untuk bergabung ke grup *whats-app* kegiatan pengabdian masyarakat ini. Grup *whats-app* ini berfungsi untuk menginformasikan jadwal

dan teknis acara pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang dilakukan pada tanggal 14 November 2020 mulai dari jam 09.30 s.d selesai. Kegiatan ini dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Sebelum kegiatan dimulai, peserta diberi informasi melalui grup *whats-app* mengenai *link* untuk mengakses *Zoom Meeting*, susunan acara dan tata tertib kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sebanyak 34 orang dari 39 orang yang mendaftar. Jumlah peserta yang berasal dari SMK Negeri sebanyak 18 orang, sementara sisanya sebanyak 16 orang berasal dari SMK Swasta. Tabel 1 menunjukkan informasi demografi 34 peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sebagian besar peserta kegiatan ini berumur di atas 40 tahun sebanyak 19 orang atau sebesar 55,9%, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang atau 15% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang atau 85%. Sebagian besar peserta berpendidikan terakhir S1 sebanyak 26 orang atau sebesar 76,5% dan S2 sebanyak 8 orang atau sebesar 23,5%. Sebagian besar peserta memiliki pengalaman kerja sebagai guru selama lebih dari 10 tahun sebesar 58,8% atau sebanyak 20 orang. Guru peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berstatus sebagai guru PNS sebesar 35,3% atau 12 orang, sementara sisanya 64,7% atau sebanyak 22 orang merupakan guru Non-PNS.

**Tabel 1.** Informasi Demografi Peserta

Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase	
Kelompok Umur	20-25	2	5,9%
	26-30	5	14,7%
	31-35	5	14,7%
	36-40	3	8,8%
	41-45	7	20,6%
	>45	12	35,3%

Jenis Kelamin	Laki-Laki	5	15,0%
	Perempuan	29	85,0%
Pendidikan Terakhir	S1	26	76,5%
	S2	8	23,5%
Pengalaman Kerja sebagai Guru	1-5 tahun	6	17,7%
	6-10 tahun	8	23,5%
	> 10 tahun	20	58,8%
Status Pekerjaan	Guru PNS	12	35,3%
	Guru Non-PNS	22	64,7%

Kegiatan dimulai oleh moderator dengan pembukaan singkat oleh moderator, penyampaian tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini, pembacaan biografi singkat narasumber, dan do'a. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai akuntansi keuangan desa oleh narasumber. Narasumber kegiatan ini adalah ketua tim pengabdian masyarakat pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang. Penyusunan materi pengabdian masyarakat ini mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah terkait desa dan pengelolaan keuangan desa, buku pedoman asistensi akuntansi keuangan desa (IAI-KASP, 2015) dan buku petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015).

Ada 6 topik bahasan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu aspek hukum keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, konsep dasar akuntansi, tahapan siklus akuntansi, penulisan bukti-bukti akuntansi dan penyusunan laporan keuangan desa. Topik bahasan mengenai aspek hukum keuangan desa menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum mengenai desa dan pengelolaan keuangan desa. Desa merupakan bagian dari pemerintah sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan desa memiliki aturan hukum yang mendasarinya. Peraturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Beberapa peraturan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. PP No. 43 tahun 2014 selanjutnya diubah menjadi PP No. 47 tahun

2015. Selain itu, beberapa peraturan yang berkaitan dengan keuangan desa diatur dalam PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 yang diubah menjadi Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Topik bahasan mengenai pengelolaan keuangan desa menjelaskan tentang definisi konsep keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan siklus pengelolaan keuangan desa. Pasal 71 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 menjelaskan keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Permendagri No. 20 tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa diharuskan untuk menyusun APBDesa yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Komponen APBDesa mencakup pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PADesa), pendapatan transfer desa dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Belanja desa berdasarkan jenisnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Pembiayaan berdasarkan jenisnya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Topik bahasan mengenai konsep dasar akuntansi menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Persamaan dasar akuntansi kemudian diperluas dengan menambahkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan ke dalam persamaan dasar akuntansi tersebut (IAI-KASP, 2015). Berdasarkan persamaan

dasar akuntansi yang diperluas tersebut, unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan desa mencakup aset, kewajiban, kekayaan bersih, pendapatan, belanja dan pembiayaan.



**Gambar 1.** Penjelasan Topik Bahasan Konsep Dasar Akuntansi

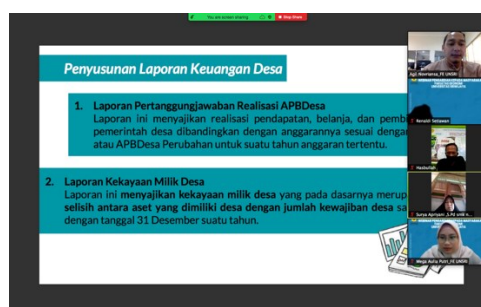
Topik bahasan mengenai tahapan siklus akuntansi menjelaskan tentang siklus akuntansi yang dibagi menjadi 4 tahapan yaitu tahap pencatatan, tahap pengelolaan, tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan (IAI-KASP, 2015). Gambar 2 menunjukkan penjelasan topik bahasan tahapan siklus akuntansi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tahap pencatatan merupakan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku yang sesuai. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldonya. Tahap pengikhtisaran merupakan tahap pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Tahap pelaporan merupakan tahapan terakhir yaitu membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa. Pada topik bahasan tahapan siklus akuntansi ini juga dijelaskan mengenai cara pencatatan transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan kekayaan bersih pemerintah desa.



**Gambar 2.** Penjelasan Topik Bahasan Tahapan Siklus Akuntansi

Topik bahasan mengenai penulisan bukti-bukti akuntansi menjelaskan mengenai sumber bukti transaksi dan penulisan buku besar. Sumber bukti transaksi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal merupakan bukti yang berasal atau dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai bukti telah terjadinya transaksi, terdiri dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar (IAI-KASP, 2015). Bukti transaksi eksternal merupakan bukti yang berasal dan dibuat oleh pihak luar akibat transaksi yang terjadi, contohnya surat tagihan, kuitansi, faktur dan sebagainya (IAI-KASP, 2015). Setiap bukti transaksi perlu diberi nomor untuk memudahkan pencatatan dan pengarsipan. Penjelasan tentang penulisan buku besar mencakup tutorial mengenai pencatatan bukti transaksi ke buku besar, pengikhtisaran buku besar laporan keuangan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa.

Topik bahasan mengenai penyusunan laporan keuangan desa pada Gambar 3 menjelaskan tentang jenis dan isi dari laporan keuangan desa. Pada topik bahasan ini juga dilakukan simulasi singkat mengenai cara penyusunan laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa terdiri dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dan laporan kekayaan milik desa.



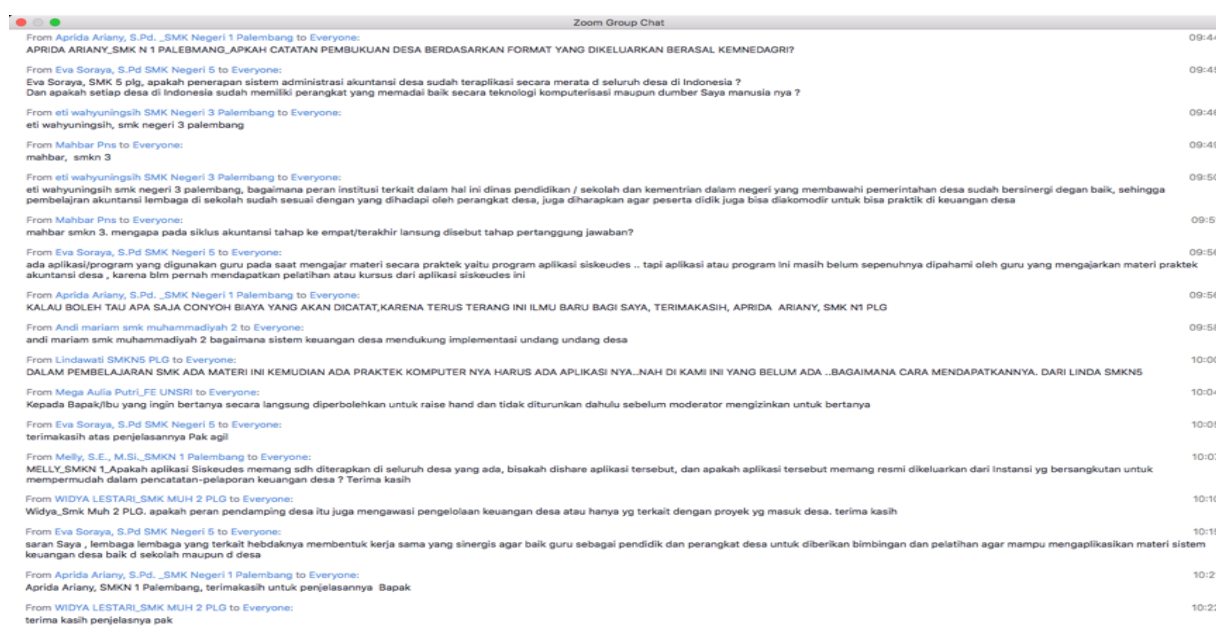
**Gambar 3.** Penjelasan Topik Bahasan Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Setelah penjelasan mengenai materi akuntansi keuangan desa, selanjutnya sesi diskusi. Penyampaian pertanyaan dari peserta kepada narasumber dilakukan melalui kolom chat di aplikasi Zoom Meeting atau secara live



langsung ke narasumber. Gambar 4 menunjukkan sejumlah pertanyaan peserta yang disampaikan melalui kolom *chat* di aplikasi *Zoom Meeting*. Beberapa pertanyaan dari peserta berkaitan dengan bagaimana praktik implementasi akuntansi keuangan desa dan bagaimana peran institusi dalam mensinergikan kebutuhan pemerintah desa terkait akuntansi keuangan desa dengan kurikulum pembelajaran di SMK. Peserta juga menanyakan tentang contoh biaya dalam laporan keuangan desa serta bagaimana peran

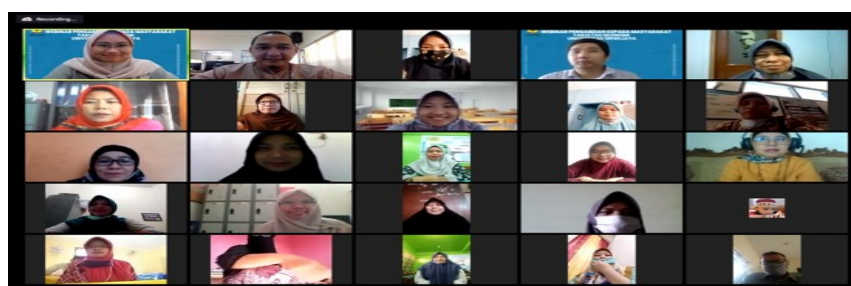
pendamping desa dalam pengelolaan desa. Sebagian besar peserta bertanya mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) karena aplikasi tersebut sangat relevan untuk praktik akuntansi keuangan desa dalam proses belajar mengajar di SMK. Sebagian besar peserta menyarankan agar ada pelatihan atau bimbingan teknis untuk para guru mengenai aplikasi Siskeudes sehingga bisa diajarkan kepada para siswa SMK. Semua pertanyaan dari peserta ditanggapi dengan baik oleh narasumber.



**Gambar 4.** Pertanyaan Peserta dalam Sesi Diskusi

Peserta selanjutnya diminta untuk mengisi *link* absensi dan *post-test* setelah sesi diskusi berakhir. *Post-test* merupakan bentuk evaluasi kepada para peserta terkait pemahaman atas materi yang telah disampaikan. Peserta diminta untuk mengisi nomor telepon untuk pemberian saldo Pulsa/Gopay/OVO sebagai bentuk apresiasi telah mengikuti acara pengabdian masyarakat ini. Pada akhir sesi kegiatan, peserta juga

diberikan sertifikat penghargaan, materi presentasi narasumber dan materi pendukung bahan ajar akuntansi keuangan desa yang dikirimkan ke email masing-masing peserta. Acara pengabdian masyarakat ini diakhiri dengan pembacaan kesimpulan oleh moderator dan foto bersama. Gambar 5 menunjukkan foto bersama tim pengabdian dan peserta pengabdian masyarakat ini.



**Gambar 5.** Foto Bersama Tim Pengabdian dan Peserta

## Pembahasan

Adanya perubahan struktur kurikulum SMK untuk jurusan akuntansi dan lembaga keuangan pada tahun 2018 menjadi suatu tantangan bagi guru-guru Akuntansi SMK di Kota Palembang. Guru-guru Akuntansi SMK dihadapkan pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya, salah satunya yaitu penyusunan laporan keuangan desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan materi atau pemahaman mengenai akuntansi keuangan desa kepada para guru akuntansi SMK di Kota Palembang.

Hasil wawancara singkat dengan peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih belum memahami materi akuntansi keuangan desa dengan baik, bahkan ada peserta yang menyatakan bahwa materi akuntansi keuangan desa yang diajarkan masih tumpang tindih dengan materi akuntansi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan beberapa peserta belum memiliki buku/referensi yang memadai mengenai akuntansi keuangan desa dan sebagian besar peserta belum pernah mengikuti pelatihan atau *workshop* mengenai akuntansi keuangan desa.

Kondisi pemahaman akuntansi keuangan desa yang minim pada guru-guru akuntansi SMK juga terjadi pada daerah lainnya. Hasil penelitian (Sari et al., 2019) pada 33 orang guru akuntansi yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Provinsi Sumatera Barat menunjukkan sebanyak 32 orang atau 96,97% menyatakan bahwa pemahaman mereka belum memadai untuk mengajarkan materi akuntansi desa dalam mata pelajaran praktikum akuntansi desa. Mereka beralasan masih kebingungan dalam merancang materi yang akan diberikan di kelas karena pemahaman dasar akuntansi pemerintahan belum cukup memadai untuk mengajarkan materi akuntansi desa (Sari et al., 2019). Hasil penelitian (Sari et al., 2019) juga menunjukkan bahwa metode *capacity building* dan *workshop* terkait materi akuntansi desa dapat meningkatkan pemahaman atas materi akuntansi desa pada guru-guru akuntansi SMK.

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan hasil yang

cukup baik. Hasil *post-test* peserta menunjukkan bahwa lebih dari 50% peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memperoleh nilai jawaban benar di atas 60. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang ini cukup efektif dalam memberikan pemahaman lanjutan mengenai materi akuntansi keuangan desa. Pemberian materi presentasi narasumber dan materi pendukung bahan ajar akuntansi keuangan desa kepada para peserta juga diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman para guru akuntansi SMK melalui proses belajar mandiri. Selain itu, materi pendukung bahan ajar akuntansi keuangan desa yang diberikan juga diharapkan dapat membantu para guru akuntansi SMK di kota Palembang dalam menyusun bahan ajar mata pelajaran akuntansi desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Perdirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 tentang perubahan struktur kurikulum SMK, di mana untuk jurusan akuntansi dan lembaga keuangan mengalami perubahan pada bagian kompetensi keahlian yaitu munculnya mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintahan. Salah satu materi pokok dalam mata pelajaran tersebut adalah penyusunan laporan keuangan desa yang merupakan bagian dari materi akuntansi keuangan desa. Materi akuntansi keuangan desa merupakan bidang ilmu yang baru bagi guru-guru akuntansi SMK. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan materi atau pemahaman mengenai akuntansi keuangan desa kepada para guru akuntansi SMK di Kota Palembang.

Ada 6 topik bahasan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu aspek hukum keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, konsep dasar akuntansi, tahapan siklus akuntansi, penulisan bukti-bukti akuntansi dan penyusunan laporan keuangan desa. Setiap topik dijelaskan dengan baik oleh narasumber dan disertai dengan tutorial/simulasi untuk topik-topik tertentu. Para peserta sangat antusias pada saat sesi



tanya jawab, cukup banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga menjadi bahan diskusi yang menarik dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Secara keseluruhan, kegiatan pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang ini terlaksana dengan baik dan lancar, semua peserta sangat kooperatif dan kondusif.

Hasil wawancara singkat dengan peserta sebelum penyampaian materi kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih belum memahami materi akuntansi keuangan desa dengan baik. Namun setelah penyampaian materi akuntansi keuangan desa dilaksanakan, hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar peserta memperoleh nilai *post test* di atas 60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembekalan materi akuntansi keuangan desa pada guru-guru akuntansi SMK di Kota Palembang ini cukup efektif dalam memberikan pemahaman lanjutan mengenai materi akuntansi keuangan desa.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menyarankan beberapa hal. Pertama, kegiatan pengabdian pembekalan materi atau pelatihan tentang akuntansi keuangan desa untuk para guru akuntansi SMK masih sangat diperlukan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini sangat disarankan untuk direplikasi pada objek daerah lain di Indonesia. Kedua, kegiatan pengabdian masyarakat ini masih sebatas penjelasan teori dan konsep sehingga untuk kegiatan selanjutnya diharapkan dapat menambahkan penjelasan mengenai penyusunan laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SisKeuDes.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, R., Hasanah, N., Fauzi, A., & Utaminingtyas, T. H. (2018). Peningkatan Pemahaman Guru-Guru SMK melalui Pelatihan Akuntansi Pemerintah Guna Menyiapkan SDM Instansi Pemerintah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 2(2), 338–354.
- Astuti, E., Murwani, J., & Sugiharto, S. (2020). Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 214–221.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 113–122.
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227–429.
- Novriansa, A., Muthia, F., Mardalena, M., & Setiawan, R. (2019). Asistensi Akuntansi Keuangan Desa di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. *Prosiding Hasil Pengabdian SEMIRATA FEB BKS-PTN Barat 2019*, 181–192.
- Sari, V. F., Pebriyani, D., & Afriyenti, M. (2019). PKM Upaya Peningkatan Pemahaman Guru-Guru Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Materi Akuntansi Desa. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 1529–1540.
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 33–37.